

BPBD Banten Minta Warga Pesisir Pantai Waspada Gempa Tektonik

SERANG (IM)- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten meminta masyarakat pesisir pantai dapat meningkatkan kewaspadaan gempa tektonik.

“Peringatan kewaspadaan itu sehubungan laporan BMKG bahwa kegunaan di pesisir selatan Pulau Jawa meningkat,” kata Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Provinsi Banten, Sumardi di Lebak, Kamis (27/5).

Pesisir selatan Pulau Jawa, di antaranya Provinsi Banten meliputi Kabupaten Lebak dan Pandeglang merupakan daerah rawan gempa dan berpotensi tsunami. Sebab, kata dia, daerah pesisir selatan itu karena adanya patahan atau sesar di Perairan Samudera Hindia dengan Benua Indo-Australia.

Selain itu juga di bagian selatan terdapat Lempeng Eurasia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian timur.

Wilayah pesisir selatan yang rawan gempa dan tsunami di antaranya mulai Pantai Sumur, Binuangun, Bagedur, Sukahujan, Cihara, Panggarangan, Bayah, Sawarna dan Tanjungpanto.

Karena itu, masyarakat pesisir Banten selatan agar meningkatkan kewaspadaan jika terjadi peningkatan gempa tektonik.

Berdasarkan laporan BMKG bahwa gempa yang terjadi di Banten selatan Minggu (23/5) tercatat 35 kali, tepatnya di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang. “Kami telah menyampaikan peringatan kewaspadaan kegunaan itu guna mengurangi risiko kebencanaan,” katanya menjelaskan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Pebby Rizky Pratama mengatakan pesisir selatan itu perlu dilakukan perubahan rencana umum tata ruang (RUTR) untuk pembangunan gedung dan rumah yang konstruksinya tahan gempa dan tsunami.

Pembangunan rumah tahan gempa dan tsunami itu untuk meminimalisasi korban jiwa dan tidak banyak menimbulkan kerugian infrastruktur maupun material. Pengalaman itu, kata dia, peristiwa gempa magnitudo 6,4 berpusat barat daya Lebak Pantai Sawarna pada 2018 dengan kedalaman 10 km hingga ribuan rumah mengalami kerusakan.

“Kami berharap masyarakat yang tinggal di pesisir selatan dapat memperhatikan pembangunan rumah tahan gempa,” ujarnya. ● pra



TES ACAK GENOSE C19 WARGA TANGERANG

Petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang menguji diagnostik sample nafas warga dengan alat GeNose C19 saat tes acak COVID-19 di Poris Gaga, Tangerang, Banten, Kamis (27/5). Dalam pelaksanaan tes acak tersebut petugas mendapati warga beralamat sama dan berdekatan reaktif COVID-19 yang selanjutnya mendapat penanganan khusus dari petugas kesehatan.

Usai Lebaran, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Melonjak

Dinkes Kota Tangerang mencatat, saat ini kondisi keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di Kota Tangerang berada di kisaran angka 34 persen. Untuk mengantisipasi ini, Dinkes telah mempersiapkan enam RIT.

TANGERANG (IM)- Peningkatan kasus Covid-19 di Kota Tangerang terus terjadi sesuai libur Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriyah/ 2021 Masehi. Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan Kota Tangerang meminta masyarakat mengikuti tes swab atau tracing mandiri guna menekan angka penyebaran Covid-19

lebih luas di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Liza Puspawati, mengungkapkan, berdasarkan data Rumah Isolasi Terkonsentrasi (RIT) pada Mei 2021, pasien yang melakukan isolasi di tempat tersebut tercatat delapan pasien per Minggu (16/5). Namun angka terus mengalami ke-

naikan hingga 80 pasien per Kamis (27/5). Sementara itu, pasien Covid-19 yang dirawat di Rumah Sakit tercatat sebanyak 414 pasien di 32 RIT se-Kota Tangerang.

Dinkes Kota Tangerang mencatat, saat ini kondisi keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di Kota Tangerang berada di kisaran angka 34 persen. “Untuk mengantisipasi ini, Dinkes telah mempersiapkan enam RIT. Saat ini sekitar 2 ribu kantong sudah digunakan dan masih akan terus bertambah,” ujarnya.

Liza mengatakan, dengan adanya tracing cepat yang masif dilakukan, kemungkinan besar juga akan semakin banyak kasus positif Covid-19 di Kota Tangerang yang ditemukan. Namun, di samping itu, dengan ditemukannya kasus-kasus Covid-19 melalui upaya tracing tersebut, Dinkes

Berdasarkan catatannya, dari tracing yang dilakukan usai libur Lebaran sejak Minggu (16/5) hingga Kamis (20/5), sebanyak 2.834 orang dilakukan swab antigen, sebanyak 33 di antaranya dinyatakan positif Covid-19.

“Tracing dilanjutkan dengan GeNose sejak Senin (24/5) hingga Senin (31/5) mendatang. Saat ini sekitar 2 ribu kantong sudah digunakan dan masih akan terus bertambah,” ujarnya.

Liza mengatakan, dengan adanya tracing cepat yang masif dilakukan, kemungkinan besar juga akan semakin banyak kasus positif Covid-19 di Kota Tangerang yang ditemukan. Namun, di samping itu, dengan ditemukannya kasus-kasus Covid-19 melalui upaya tracing tersebut, Dinkes

Kota Tangerang, juga bisa lebih cepat dalam melakukan penanganan.

Liza tak memungkiri, mobilitas warga saat libur Lebaran Idul Fitri menyebabkan terjadinya peningkatan kasus terkonfirmasi Covid-19, sehingga dia mengklaim kesiapan untuk mengantisipasinya sudah dilakukan. “Melihat potensi itu, segala persiapan dilakukan, yaitu 10 ribu swab PCR, 12 ribu swab antigen dan 10 ribu kantong GeNose,” jelasnya.

Dengan sejumlah upaya yang dilakukan Pemkot Tangerang, Liza meminta masyarakat untuk terus disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan guna menekan angka Covid-19 yang kian bertambah di Kota Tangerang. ● pp

Jalan Tol Serang-Panimbang Bawa Berkah Buat Masyarakat di Lebak

SERANG (IM)- Jalan Tol Serang-Panimbang yang kini masih dalam tahap pembangunan dipastikan membawa berkah bagi Kabupaten Lebak yang tertinggal jauh dengan wilayah utara Provinsi Banten.

Kawasan wilayah utara Tangerang Raya lebih dulu pesat sebagai pusat kawasan industri hingga menyerap tenaga kerja dari berbagai provinsi di Tanah Air.

Perkembangan Kabupaten Lebak akan menyusul dengan daerah dengan sebutan Pendekar Cisadane itu, setelah dioperasikan jalan tol Serang-Panimbang.

Di mana wilayah barat Provinsi Banten di Kecamatan Gileles, Kabupaten Lebak, seluas 3.000 hektare sangat berpotensi menjadi kawasan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT), seperti di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Pengembangan KIT dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi baru, sehingga mampu mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini Kabupaten Lebak masih tinggi angka garis kemiskinan dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 tercatat 107.930 jiwa dari 1,3 juta penduduk di wilayah tersebut menyandang kemiskinan.

Kehadiran pembangunan jalan tol Serang-Panimbang tentu berdampak positif karena bisa menyerap lapangan pekerjaan juga peningkatan pertumbuhan

ekonomi masyarakat setelah di jadikan pengembangan KIT itu.

“Kami yakin jalan tol itu membawa berkah bagi warga dan dipastikan tingkat pendapatan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik,” kata Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.

Pengoperasian jalan tol tersebut dapat menghubungkan antara Jakarta dan Lebak dengan tiga segmen. Realisasi pembangunan jalan tol segmen pertama pada bulan Juli 2021 itu akan diremikan dan segmen dua dan tiga paralel.

Pembangunan jalan tol segmen dua dan tiga secara paralel yang satu dibangun oleh pengelola jalan tol, sedangkan yang satu lainnya dibangun pemerintah dengan anggaran pinjaman dari Tiongkok.

Kemungkinan besar pembangunan jalan tol segmen dua dan tiga secara paralel itu rampung pada 2023.

Selama ini, kata dia, pembangunan jalan tol berjalan lancar dan masyarakat mendukung kehadiran jalan tol tersebut.

Keberadaan jalan tol itu bertujuan untuk membangun kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru khususnya di Kabupaten Lebak.

“Kami optimistis pengembangan KIT seluas 3.000 hektare dan sangat cocok untuk dijadikan kawasan industri,” katanya.

Pengembangan KIT di Kabupaten Lebak, nantinya dibangun rencana induk yang dibiayai oleh Kementerian Investasi seiring selesainya jalan tol Serang-Panimbang itu. ● pra

DISEDIAKAN LAHAN UNTUK BANGUN TANDON Pemkot Tangsel Batalkan Rencana Relokasi Warga Pondok Maharta

TANGSEL (IM)- Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie membatalkan rencana jangka panjang merelokasi sejumlah warga di Perumahan Pondok Maharta untuk membangun tandon. Pernyataan tersebut menanggapi adanya penolakan dari sejumlah warga atas rencana relokasi dalam rangka penanggulangan banjir di kawasan tersebut.

“Kalau memang enggak ada lahan kosong mungkin saja seperti itu (relokasi). Tapi karena ada lahan kosong, kami akan fokus kesitu. Ini rencana yang sedang kami tempuh saat ini, tidak yang lain,” ujar Benyamin saat dikonfirmasi, Kamis (27/5).

Menurut Benyamin, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah berkoordinasi dengan pihak pengembang perumahan untuk menyediakan lahan kosong untuk dibangun tandon. Dari hasil koordinasi, terdapat lahan seluas kurang lebih 9.000 meter persegi yang memungkinkan untuk membangun tandon penampung air. Lahan tersebut terletak tak jauh dari lingkungan RW kawasan Perumahan Pondok Maharta yang paling terdampak banjir.

“Kebetulan posisinya tepat di sebelah RT RW yang selalu banjir. Berlokasi di titik

koordinat banjir yang ada di kompleks Pondok Maharta,” kata Benyamin.

Saat ini, kata Benyamin, pihaknya tengah mengatur pertemuan dan membahas lebih lanjut wacana pembangunan tandon tersebut yang diharapkan bisa direalisasikan pada tahun ini. Pemerintah Kota Tangerang Selatan berharap pelaksanaan pembangunan tandon tersebut bisa dilakukan oleh pihak pengembang.

“Harapannya pembangunan oleh pengembang, ini yang lagi dinegosiasikan. Nanti setelah dibangun, yang lain-lainnya serahkan kepada pemerintah kota,” pungkasnya.

Sebelumnya, Warga Perumahan Pondok Maharta tak sepatutnya dengan rencana relokasi yang dipersiapkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengatasi banjir.

Tyas (27), warga Pondok Maharta, mengatakan bahwa rencana relokasi tersebut dinilai tidak tepat dan berpotensi merugikan warga.

“Enggak tepat kalau relokasi. Mengingat kami ini kan lokasinya strategis, sayang aja kalau harus direlokasi misalnya ke rumah susun atau tempat lain,” kata dia, Selasa (25/5).

Menurut dia, pemerintah kota seharusnya memikirkan rencana jangka pendek untuk

mengatasi banjir yang kerap terjadi di kawasan perumahan tersebut. Sebab, penanganan banjir yang selama ini dilakukan terbilang lambat dan tidak ada upaya antisipasi.

“Lambat banget, baru datang itu kalau sudah viral, di-posting ke medsos, baru kelihatan,” kata Tyas.

“Kemarin itu seminggu tiga kali, di lingkungan saya kebanyakan orang tua sampai lelah. Trauma juga jadinya, aduh harus berbenah lagi, itu kan capek banget,” sambungnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua RT 005 RW 009 Pondok Maharta, Wahyu Riadi. Sebagian besar warganya menolak setelah mengetahui informasi mengenai rencana relokasi tersebut.

“Untuk relokasi itu ada beberapa warga yang sangat menolak, tapi itu belum semua warga kami mintakan pendapatnya,” kata Wahyu.

Menurut Wahyu, dia bersama warga dan pengurus lingkungan telah menawarkan sejumlah solusi jangka pendek untuk meminimalkan terjadinya banjir.

Salah satunya dengan memperbesar saluran air dan memasang pintu air yang dapat ditutup ketika volume Kali Sarua mulai penuh, kata Wahyu. ● pp

Ketua Organda Tangsel Ditemukan Tewas Membusuk

TANGSEL (IM)- Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Yusro Siregar (60) ditemukan meninggal dunia di kantornya, Jalan Raya Serpong, Setu, Kamis (27/5).

Saat ditemukan pagi tadi sekira pukul 07.30 WIB, jasad Yusro sudah dalam kondisi telah membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Petugas dari Mapolsek Cisauguk langsung mendatangi lokasi guna melakukan penyelidikan.

“Pagi tadi kita dapat laporan, lalu kita cek. Jasad korban ini sudah mengeluarkan bau tak sedap,” kata Kapolsek Cisauguk, AKP Fahad Hafidhulhaq, di lokasi.

Dilanjutkan Fahad, dari

kondisi jasadnya yang sudah mengeluarkan bau busuk maka diduga korban sudah meninggal lebih dari 1 hari lalu. Keterangan pihak keluarga menyebut, jika Yusro memang memiliki riwayat sakit stroke.

“Lebih dari satu hari, mungkin dari sebelum libur kemarin. Korban ini punya riwayat sakit stroke,” jelasnya.

Posisi kantor Organda Tangsel sendiri memang bersebelahan dekat pelayanan uji KIR kendaraan, satu area dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Kantor Kecamatan Setu.

“Tidak ada bekas kekerasan, diduga karena riwayat sakit itu,” pungkasnya. ● pp



PSU PILGUB JAMBI

Warga antre untuk memberikan suara pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Muarojambi, Jambi, Kamis (27/5). Sebanyak 88 TPS di lima kabupaten/kota di Provinsi Jambi serentak melakukan pemungutan suara ulang hari ini.

Sengkarut Bancakan Hibah Mengatasnamakan Pesantren di Banten

SERANG (IM)- Penyaluran hibah ke ribuan pondok pesantren yang kasus korupsinya disidik Kejati Banten mau tidak mau membuat lembaga pendidikan agama ini jadi perbincangan. Bagaimana bisa pesantren ada di pusaran kasus hibah Rp 66 miliar tahun anggaran 2018 dan Rp 117 miliar di 2020 yang disalurkan Pemprov Banten.

Tokoh Banten, Matin Syarkowi menyebut bahwa pesantren di kasus ini adalah korban. Tapi, fakta bahwa ada tersangka ditetapkan Kejati, maka pengakuan hukum harus tuntas. Ia juga mendorong Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) yang menerima hibah ini di 2018 agar bersikap terbuka dan tegas jika memang ada oknum yang memotong hak pesantren itu.

“Pesantren jadi korban, faktanya sudah ada tersangka yang memungut, pemotongannya ada, oleh oknum. Ada kiai dari Curug (Kota Serang) datang (bercerita) dipotong juga Rp 10 juta tahun 2018. Ancamannya begini, kalau tidak memberikan tidak dikasih lagi,” kata Matin di Serang, Kamis (27/5).

Contoh laporan di atas menurutnya bukti bahwa memang ada oknum yang memanfaatkan dana hibah. Bila bicara soal hukum dan dalam rangka tabayun dalam Islam, pesantren mestinya tidak malu dan terbuka memberikan pengakuan. Pesantren ia tegaskan jadi korban di pusaran kasus ini.

“Sekali lagi, pesantren itu menjadi korban oknum para penanam. Siapa? Wallhu’alam karena ranah hukum,” ujar Matin.

Padahal, menurut dia, bantuan hibah Rp 20 juta per pesantren di tahun 2018 relatif kecil. Bantuan itu, oleh kiai-kiai kampung cuma mau dibantu sekedar sederhana, jika potongannya hingga setengahnya, bantuan itu tidak jadi apa-apa dan malah membuat jelek nama pesantren. “Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Pimpinan

pesantren, pesantren? Oknum yang salah,” ucap Matin.

Fadlullah, selaku Sekjen FSPP menuturkannya, FSPP di 2018 menerima hibah Rp 66 miliar untuk disalurkan ke pondok yang merupakan anggotanya. Transaksi hibah dilakukan mulai dari BPKAD ke FSPP hingga ke pesantren melalui rekening.

“FSPP mentransfer dana hibah yang peruntukannya untuk pemberdayaan. Ke mana? Dari rekening ke rekening, ke rekening pondok pesantren. Jadi jangan dibayangkan bawa kresak bawa duit, enggak ada itu. Yang ada adalah transfer Rp 20 juta di Bank Banten ke rekening ponpes yang juga ada di Bank Banten,” ujar Fadlullah.

Bagaimana jika pesantren itu fiktif? Maka FSPP memanfaatkan data EMIS milik Kementerian Agama. Data itu oleh organisasinya diverifikasi berjenjang mulai dari kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

Memang, lanjutnya ada pesantren yang tidak memiliki izin operasi dan akta notaris tapi pesantrennya betul ada di kampung-kampung. Maka, dibuatkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kemeng kabupaten atau kota setempat.

“Mereka ini lah ponpes yang sudah diverifikasi 2018. Yang kemudian mereka diberi kesempatan buka rekening di Bank Banten untuk memudahkan,” kata Fadlullah menegakkan.

Penerima hibah pesantren ini juga melakukan pakta integritas. Semua kiai menandatangani termasuk komitmen untuk menolak jika ada yang mau melakukan pemotongan.

“Kiai itu membuat laporan peruntukannya, Sehingga kalau dana Rp 20 juta digunakan dan 20 juta persis. Pengamatan kami realisasinya (malah) lebih, bantuan Rp 20 juta karena lebih, ngapain korupsi terhadap dirinya sendiri,” ujar Fadlullah. ● pra

Di Lebak, Antrean Bank tak Indah Protokol Kesehatan



LEBAK (IM)- Kerumunan di salah satu bank di kabupaten Lebak tepatnya di pasar kota Rangkasbitung sepertinya tak mengindahkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kerumunan ini tampak terlihat di bagian luar Bank swasta berlogo bunga berwarna biru itu. Saat awal media mencoba mengambil dokumentasi, sempat sempat mencoba menghalau kerumunan.

Iroh, seorang nasabah yang berasal dari Kp. Kedung desa Pabuaran. Kecamatan Kolelet, mengaku sudah mengantre dari pagi untuk mendapatkan pelayanan dari Bank Swasta tersebut.

“Abdi tos ngantri ti enjing pa, tapi kumaha ja pinuh bae, kapaksa tumpangun” (saya sudah mengantre dari pagi, tapi mau gimana lagi terpaksa berdesakan biar cepat mendapatkan pelayanan) ujar Iroh dengan logat sunda.

Sementara itu, Aktifis Pemerhati Covid-19, Hasan Basri Spdi ketika diminta komentar terkait kerumunan massa yang ada di salah satu bank swasta tersebut mengatakan bahwa ini terjadi akibat lambannya pelayanan pihak manajemen Bank tersebut dalam melayani nasabah.

“Pelayanan pihak manajemen terkesan lamban, sehingga mengundang kerumunan. Semestinya pihak Bank mengantisipasi membeludanya para nasabah dengan cara yang cepat, dan efisien.”

“Hayangna kami mah masyarakat nu tis menang nomor antrian Kamaru diprioritaskan teu kudu antri deui antri deui” (redinginnya kami yang sehari kemarin sudah mempunyai nomor antrian diprioritaskan jangan sampe mulai antrean lagi antrean lagi), ujar Achong salah satu nasabah yang akan membuat rekening. ● nov